

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Program Strategis Terancam

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.2

Edisi : Selasa, 26 Juni 2018

## Program Strategis Terancam

### **BANDUNG, (PR).-**

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bakal meninggalkan beberapa rintisan program besar yang belum pasti keberlanjutannya. Di tangan pemimpin baru, ada peluang program-program baru tersebut berhenti di tengah jalan.

Setidaknya ada dua program strategis yang dirintis Pemkot Bandung di era Ridwan Kamil, yakni pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pembentukan PT Bandung Infra Investama (BII). Skema KPBU hingga saat ini belum memiliki payung hukum berupa peraturan daerah (perda). Dalam Perda Kerja Sama Daerah yang disahkan tahun lalu, DPRD Kota Bandung mencoret pasal tentang skema KPBU. Padahal, pemkot sudah berancang-ancang mengeksekusi skema KPBU dalam proyek penerangan jalan umum (PJU) dengan nilai investasi sekitar Rp 700 miliar.

Pembentukan PT BII, meski sudah memiliki payung hukum berupa peraturan daerah baru, masih memerlukan beberapa peraturan tambahan terkait penyertaan modal senilai maksimal Rp 5 triliun. Proses ini lagi-lagi membutuhkan kesepakatan politik antara wali kota dan DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Haru Suandharu menyatakan, keberlanjutan program-program ini bakal banyak bergantung pada kemampuan wali kota baru meyakinkan para anggota dewan. Menurut dia, keputusan meneruskan atau menghentikan program tidak didasarkan urusan individu.

"Patokannya nanti tetapkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan perda-perda. Bukan berdasarkan individu. Kalau dasarnya individu, justru akan banyak masalah," kata Haru, Senin (25/6/2018).

Dijelaskan Haru, DPRD belum menyetujui rencana pemkot tentang KPBU karena masih ada perbedaan pandangan terhadap skema pembiayaan ini. Dewan menghendaki tidak ada utang dalam pembiayaan pembangunan. Mereka cenderung

mempertahankan skema pembiayaan lewat APBD.

Pertimbangan lain yang membuat DPRD keberatan dengan usulan skema KPBU adalah minimnya komunikasi antara kedua lembaga. Pemkot tiba-tiba datang dengan rencana yang relatif matang tentang proyek PJU. "Kami minta semua dikomunikasikan secara intensif. Pertimbangan utamanya tetapkan kepentingan masyarakat. Kalau pembangunan rumah sakit, jelas itu penting. Kalau PJU, taman atau stadion, kita bisa berdebat," tutur politisi PKS tersebut.

Haru berharap semua program rintisan Wali Kota Ridwan Kamil bisa tuntas dibahas sebelum berakhir masa jabatan. Namun, ia juga meminta pemkot tidak mendesak dewan agar buru-buru mengesahkan perda-perda baru. "Dewan jangan dipaksa-paksa. Perda itu kan produk politik. Kalau tidak bisa tuntas di masa kepemimpinan sekarang, ya biarkan wali kota berikutnya yang meneruskan. Tidak harus semua selesai sekarang," katanya.

Ridwan Kamil tetap optimistis program-program besar yang ia rintis

bakal berkelanjutan. Namun, ia juga mengakui dibutuhkan pembahasan-pembahasan politik lebih mendalam ke depannya. "Saya kira (perda-perda) ini merupakan kesepakatan politik institusional, bukan pribadi. Kalau yakin kesepakatan ini baik, ya kita tunggu saja (untuk) diselesaikan wali kota berikutnya," ucapnya.

Berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 ini, Ridwan dipastikan bakal meninggalkan jabatan wali kota per September 2018 mendatang. Ia menjanjikan dukungan terhadap penuntasan program-program besar yang ia rintis jika terpilih sebagai gubernur.

Ridwan menjanjikan beberapa program kerja prioritas selama tiga bulan terakhir masa kepemimpinannya di Bandung. Salah satunya penempatan sekretaris daerah (sekda) definitif. Ia juga menyinggung bakal ada perombakan kepala dinas, selain pengoptimalan pengerjaan proyek-proyek dalam APBD 2018. "Kami akan menyelesaikan APBD 2018 semaksimal mungkin. Proyek-proyek infrastruktur bakal diakselerasi. Yang baru ya proyek-proyek fisik ini," ujarnya. **(Tri Joko Her Riadi)\*\*\***